



Mengembangkan Kemampuan Berpikir Kritis Warga Negara Muda Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan

Wulan Nuraeni ^{a,1}, Kokom Komalasari ^{b,2}, Asep Mahpudz ^{c,3}

^a Universitas Pendidikan Indonesia, Indonesia

¹ wulanuraeni14@upi.edu*

*korespondensi penulis

ABSTRAK

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam menyiapkan warga negara muda untuk menghadapi perubahan zaman. Pembelajaran PKn perlu dikonstruksi secara humanis, dialogis, kritis, dan mengedepankan budi pekerti untuk membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam kehidupan masyarakat demokratis. Berdasarkan ulasan tersebut, artikel ini bertujuan untuk memaparkan secara komprehensif dalam kajian PKn untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis. Penulisan artikel menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Data bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dan identifikasi wacana. Sementara teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi. Hasil dari pembahasan artikel ini menunjukkan bahwa PKn berdasarkan teori kritis dapat dikonstruksi melalui 3 model rasionalitas yaitu rasionalitas teknis, rasionalitas hermeunetik dan rasionalitas emansipatori yang menekankan metode dialogis dan peran guru sebagai pendidik transformatif. Dengan demikian peserta didik dapat berperan sebagai subjek pendidikan yang memiliki otonomi, kebebasan, dan kemampuan berpikir kritis untuk menjadi warga negara muda yang kritis dan transformatif.

ABSTRACT

Civic education have an important position to prepare young people for their roles and responsibilities as good citizens. Civic education needs to be humanist, dialogical, critical, and put forward character building to build the critical thinking ability of students in the life of democratic society. Based on these reviews, this article aims to describe develop critical thinking skills of young citizens through learning civic education to realize students who have the ability to think critically. The article is written by descriptive qualitative research method with literature study approach. The source of data is come from the books, journals, and other scientific articles which collected by documentation techniques and discourse identification. While the data analysis techniques using content analysis techniques. The result of this discussion shows that Civics based on critical theory can be constructed through 3 rationality models namely technical rationality, hermeunetic rationality and emancipatory rationality that emphasizes the dialogical method and the role of teachers as transformative educators. So the students can be educational subjects with autonomy, freedom and critical thinking skills to become critical and transformative citizens.

Informasi Artikel

Diterima : 05 Juni 2025

Disetujui: 05 Agustus 2025

Kata kunci:

Pendidikan kewarganegaraan,
Berpikir Kritis, Warga Negara
Muda

Article's Information

Received: 05 June 2025

Accepted: 05 August 2025

Keywords:

Civic Education, Critical Pedagogy,
Young Citizens

Pendahuluan

Pendidikan merupakan sebuah proses yang digunakan dalam rangka pembangunan nasional, salah satunya untuk menjadikan warga negara menjadi warga negara yang baik (to be good citizens) dan kegiatan pendidikan yang dilakukan tentulah memiliki tujuan yang hendak dicapai sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dalam pasal 3 yang menyatakan bahwa "Tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Menurut Susanto (Hidayati, 2008: 64) bahwa perkembangan pengetahuan dan teknologi berdampak besar terhadap perubahan masyarakat seperti pergeseran budaya, nilai, dan agama yang digantikan dengan nilai-nilai yang tidak selalu sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan nilai. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa saat ini kehidupan manusia begitu kompleks. Hal ini didasarkan pada realitas bahwa pada abad 21 manusia menghadapi beberapa tantangan global seperti perubahan cepat masyarakat dalam melintasi batas-batas nasional, pengakuan yang berkembang dari hak-hak masyarakat adat dan kelompok minoritas, runtuhnya struktur politik dan kelahiran yang baru, perubahan peran perempuan dalam masyarakat, dampak ekonomi global dan perubahan pola kerja, dampak teknologi informasi komunikasi, peningkatan populasi global, dan penciptaan bentuk-bentuk baru dari masyarakat (Kerr, 1999: 9).

Tanpa sumber daya manusia yang berkualitas, sudah dapat dipastikan pembangunan tidak dapat berjalan dengan lancar. Salah satu ciri manusia berkualitas dapat terlihat dari kemampuannya dalam menyelesaikan masalah yang ada disekitarnya dengan melihat dari berbagai sudut pandang. Menurut Wilson (dalam Anggraeni, 2012, hlm. 183) “berpikir kritis adalah penggunaan intelegensi dalam membuat keputusan, kemampuan ini terbentuk melalui proses perkembangan.” Sehingga melalui berpikir kritis kita dapat memecahkan sejumlah persoalan dengan mencari jawaban yang tepat.

Mata pelajaran yang dapat dijadikan sebagai alat pembentukan kematangan moral, pribadi dan karakter warga negara yang baik salah satunya melalui mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peranan penting sebagai wahana untuk mengembangkan kemampuan, watak, dan karakter warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Dari penjelasan tersebut Pendidikan kewarganegaraan bertujuan meningkatkan kualitas peserta didik salah satunya dalam aspek kemampuan berpikir kritis dalam menanggapi isu-isu yang sedang kontroversial di masyarakat yang tentu hal ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional negara republik Indonesia. Sejalan dengan Zuchdi (2009, hlm 124) yang mengatakan bahwa “dalam kondisi kehidupan yang berubah-ubah seperti saat ini, kerap kali pengetahuan yang kita miliki tidak dapat kita terapkan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul. Oleh karena itu diperlukan keterampilan berpikir kritis dan kreatif...”

Pada realitanya PKn mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pergeseran sosial dan politik kenegaraan di beberapa negara mendesak munculnya berbagai studi tentang penelitian perkembangan PKn secara komprehensif. Disamping itu, muatan PKn yang rentan terhadap indoktrinasi politik maupun kebijakan rezim yang berkuasa juga menjadi salah satu determinan penting dalam revitalisasi PKn.

Proses pembelajaran yang dilakukan pendidik dan peserta didik seharusnya mengacu pada meningkatnya kualitas sumber daya manusia yang memiliki keterampilan, salah satu keterampilan yang perlu dikuasai adalah keterampilan berpikir kritis, peserta didik dituntut untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya khususnya dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan supaya terciptanya warga negara muda yang cerdas (*smart citizens*).

Dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis tentu tidak terjadi begitu saja, tetapi harus dilatih dalam proses pembelajaran yang mendukung. Oleh sebab itu penulis akan membahas tentang bagaimana peran pembelajaran Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis pada warga negara muda.

Metode yang digunakan dalam penyusunan artikel ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Data bersumber dari buku, jurnal, dan artikel ilmiah lainnya yang dikumpulkan melalui teknik dokumentasi, identifikasi wacana dari buku, jurnal, makalah, artikel online, majalah, surat kabar, dan sumber bacaan lain yang relevan dan berhubungan dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis warga negara muda melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Sementara teknik analisis data menggunakan teknik analisis isi dengan mengorganisasikan serta mengkategorikan data untuk menemukan hasil penelitian yang akan menjadi kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Konsep Keterampilan Berpikir Kritis

Menurut Somantri (2001, hlm. 165) bahwa keterampilan berpikir adalah: seperangkat jenis-jenis keterampilan dan dimensi berpikir serta keterampilan sosial dan berkomunikasi yang terdiri atas lima tingkat, yaitu: menafsirkan, menerapkan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi. Keterampilan dalam dimensi ini termasuk keterampilan mengajukan pertanyaan, dan merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, mengumpulkan data, menafsirkan, menganalisis, mengkoreksi dan menguji, hipotesis, merumuskan generalisasi, serta mengkomunikasikan kesimpulan.

Berdasarkan pengertian tersebut bahwa berpikir dapat dibagi menjadi beberapa dimensi diantaranya menafsirkan, menerapkan, menganalisis, menyintesis, dan mengevaluasi, hal tersebut sangat perlu dikembangkan secara aktif dalam proses pembelajaran, agar kemampuan berpikir dapat diasah kekritisannya, hal tersebut dapat melatih memecahkan berbagai masalah kehidupan pribadi peserta didik maupun kemasyarakatan yang bertujuan untuk seseorang dapat mempertimbangkan serta menilai sesuatu dengan baik.

Sebagaimana Johnson (dalam Sapriya, 2013. Hlm. 123) merumuskan berpikir kritis secara etimologis, yaitu: Kata “critic” dan “critical” berasal dari “krinein”, yang berarti “menaksir nilai sesuatu”. Lebih jauh, ia menjelaskan bahwa kritik adalah perbuatan seseorang yang mempertimbangkan, menghargai, dan menaksir nilai sesuatu hal. Tugas orang yang berpikir kritis adalah menerapkan norma dan standar yang tepat terhadap suatu hasil dan mempertimbangkan nilainya dan mengartikulasikan pertimbangan tersebut. Dalam hal ini, berpikir kritis adalah tidak hanya mempertimbangkan, menghargai, dan menaksir nilai sesuatu hal. Melainkan seseorang yang berpikir kritis mampu menerapkan norma dan standar yang tepat terhadap suatu nilai yang dimana hal itu hasil dari pertimbangan yang tepat. Sebagaimana Sapriya dan Winaputra (2003, hlm. 196) bahwa “berpikir kritis adalah suatu proses berpikir kritis dengan mengemukakan penilaian dengan menerapkan norma standar yang tepat dan proses berpikir kritis merupakan bagian dari keterampilan kompleks.”

Dari konsep berpikir dan kritis yang telah dijelaskan di atas, kemudian dapat disimpulkan sebagaimana Ennis (dalam Sapriya dan Fitriyari, 2012, hlm. 223) menjelaskan bahwa: Berpikir kritis merupakan istilah yang digunakan untuk suatu aktifitas reflektif untuk mencapai tujuan yang memuat keyakinan dan perilaku yang rasional. Ia pun telah melakukan identifikasi lima kunci unsur berpikir kritis yakni praktis, reflektif, rasional, terpercay, dan berupa tindakan. Dengan didasari oleh pemikiran inilah, ia merumuskan definisi bahwa berpikir kritis merupakan aktifitas berpikir secara reflektif dan rasional yang difokuskan pada penentuan apa yang harus diyakini atau dilakukan.

Meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berpikir kritis itu tidak bisa hanya disampaikan atau dijelaskan saja, akan tetapi harus melatih dan mempraktekan keterampilan tersebut. Menurut Harnadek (dalam Hassoubah, 2003, hlm. 90) bahwa “critical thinking is a skill which must be practiced in order to develop effectively.” Jadi, kemampuan berpikir kritis bukanlah

suatu kemampuan yang ada secara alami dalam setiap diri manusia. Melainkan kemampuan berpikir kritis akan berjalan secara efektif apabila kemampuan tersebut dilatih dan dipraktekkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari.

Konsep Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang wajib diberikan dan dipahami oleh peserta didik sebagai warga negara. Hal tersebut secara yuridis tercantum dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) dan (2). Menurut Winarno (2013, hlm. 13) dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa "Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air". Maka dari itu Pendidikan Kewarganegaraan merupakan suatu program pendidikan yang dirancang untuk membentuk peserta didik sebagai warga negara yang berkualitas dengan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Kerr (dalam Winataputra dan Budimansyah, 2012, hlm. 5), mengemukakan bahwa Citizenship Education or Civics Education didefinisikan sebagai berikut: Citizenship or Civics Education is construed broadly to encompass the preparation of young people for their roles and responsibilities as citizens and in particular, the role of education (through schooling, teaching and learning) in that preparatory process.

Dari definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan secara luas mencakup proses penyiapan generasi muda agar dapat bertanggung jawab sebagai warga negara. Sedangkan secara khususnya, peran pendidikan termasuk di dalamnya mencakup persekolahan, pengajaran, dan belajar dalam proses penyiapan peserta didik sebagai warga negara.

Selanjutnya, Cogan (dalam Wuryan dan Syaifullah, 2009, hlm. 4) mengartikan civics education sebagai "...the foundational course work in school designed to prepare young citizens for an active role in their communities in their adult lives," maksud dari pendapat tersebut adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda dan kelak ketika dewasa dapat berperan aktif dalam kehidupan di masyarakatnya.

Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dapat dijelaskan dari perspektif filsafat ilmu dengan mempertimbangkan beberapa aspek penting, seperti epistemologi, ontologi, dan aksiologi. Berikut ini adalah beberapa hakikat PKn yang dapat dijelaskan dari perspektif filsafat ilmu. Ontologi: PKn membahas tentang hubungan antara individu dengan masyarakat dan bangsa, serta bagaimana individu berkontribusi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa bagi warga negara. Menurut Budimansyah (2017) menyebutkan bahwa: Ontology PKn menuntut proses epistemologi yang tidak bersifat bebas nilai dan sekuler, melainkan bersifat akademik dan profetik yang berbasis nilai dan moral Pancasila. Ontologi PKn meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan, khususnya mengenai kewajiban dan haknya sebagai warga negara dalam konteks interaksi antarwarganegara dan antara warganegara dan negara

Epistemologi PKn membantu siswa memahami cara pemerintah dan cara berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Hal ini mempengaruhi bagaimana siswa mengevaluasi informasi dan mengambil keputusan yang sejalan dengan realitas. Epistemologi adalah cabang dari filsafat yang berkaitan dengan hakikat atau teori pengetahuan. Menurut Mehlinger dalam (Budimansyah. 2017) menyebutkan bahwa: Dalam konteks epistemologis, PKn sebagai suatu system pengetahuan sudah memenuhi semua persyaratan formal sebagai disiplin ilmu, yakni adanya: tujuan yang ingin dicapai, pola berpikir, pendekatan dan metode, kegiatan pengembangan, istilah dan symbol, warisan kepustakaan, dan Masyarakat Ilmiah.

Dalam konteks analisis bidang studi PPKn, pemahaman epistemologi memengaruhi cara guru PPKn memandang dan menyampaikan pengetahuan tentang kewarganegaraan, sistem pemerintahan, partisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta penyelesaian masalah sosial. Pancasila memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pembelajaran Pancasila, yang membentuk pendekatan dan metode pengajaran dalam analisis PPKn. Dengan demikian, pemahaman epistemologi memberikan landasan filosofis yang mendukung pengembangan kurikulum dan metode pengajaran dalam analisis bidang studi PPKn.

Aksiologi PKn mengajarkan siswa cara berakti dan menghargai perbedaan budaya dan latar belakang sosial, serta mengembangkan keterampilan dan sikap pengambilan keputusan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional. Menurut Kusmidat (2011) Dalam konteks pendidikan, PKn juga mempengaruhi proses belajar dan pengajaran dalam sekolah. Beberapa aspek penting yang terkait dengan PKn dalam pendidikan sekolah meliputi:

- a. Pengembangan kemampuan dasar dan pengetahuan mengenai hubungan warga negara Indonesia dengan negara-negara lain dan berbagai aktor politik, sosial, dan ekonomi.
- b. Pembelajaran siswa tentang sistem pemerintahan, cara berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, serta cara mengatasi masalah sosial.
- c. Pengembangan keterampilan komunikasi, negosiasi, dan pengambilan keputusan yang sejalan dengan tujuan pendidikan nasional.

Secara keseluruhan, PKn dapat membantu peserta didik sebagai generasi muda mengembangkan kemampuan dan meningkatkan kualitas kehidupan serta martabat manusia, sejalan dengan tujuan pendidikan nasional

Mengembangkan kemampuan berpikir kritis warga negara muda melalui pembelajaran pendidikan pancasila dan kewarganegaraan.

Pada abad 21 manusia menghadapi beberapa tantangan global seperti perubahan cepat masyarakat dalam melintasi batas-batas nasional, pengakuan yang berkembang dari hak-hak masyarakat adat dan kelompok minoritas, runtuhnya struktur politik dan kelahiran yang baru, perubahan peran perempuan dalam masyarakat, dampak ekonomi global dan perubahan pola kerja, dampak teknologi informasi komunikasi, peningkatan populasi global, dan penciptaan bentuk-bentuk baru dari masyarakat (Kerr, 1999: 9). Guna menghadapi tantangan tersebut, hasil studi Kerr (1999: 2) di 16 negara menempatkan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) sebagai topik penting, pendekatan abad baru, dan mendesak bagi banyak negara untuk mempersiapkan warga negara muda agar mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya melalui peran pendidikan. Hal ini tak lain adalah untuk menghadapi tantangan dan ketidakpastian hidup dalam dunia yang cepat berubah.

Pada realitanya PKn mengalami perkembangan yang cukup dinamis. Pergeseran sosial dan politik kenegaraan di beberapa negara mendesak munculnya berbagai studi tentang penelitian perkembangan PKn secara komprehensif. Disamping itu, muatan PKn yang rentan terhadap indoktrinasi politik maupun kebijakan rezim yang berkuasa juga menjadi salah satu determinan penting dalam revitalisasi PKn. Sebagaimana pendapat Giroux (1980: 331) bahwa jika ingin menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui revitalisasi PKn maka esensi PKn harus terbebas dari beban intelektual dan sejarah ideologi agar dapat dikembangkan rasionalitas baru untuk meneliti hubungan sekolah dan masyarakat yang lebih luas. Pada konteks inilah penting kiranya menelaah diskursus pendidikan kritis dan rasionalitas dalam kajian PKn untuk mewujudkan peserta didik yang kritis dan demokratis dalam merespon perkembangan dan tuntutan zaman.

Hal yang tak kalah penting adalah bagaimana peran pendidik dalam mewujudkan kebijakan PKn yang berorientasi pada konsepsi kewarganegaraan multidimensional sebagai konsepsi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan manusia pada abad ke-21. Selaras dengan hal tersebut Banks (2008: 135) menyatakan bahwa pada abad 21 konsep PKn perlu ditata ulang agar dapat melakukan pendidikan secara efektif pada peserta didik melalui pengetahuan akademik transformatif. Lebih lanjut Banks (2008: 135) menegaskan “transformative citizenship education helps students to develop the decision making and social action skills that are needed to identify problems in society, acquire knowledge related to their homes and community cultures and languages, identify and clarify their values, and take thoughtful individual or collective civic action. It also fosters critical thinking skills and is inclusive of what De Jaeghere calls critical citizenship education”. Dari pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa PKn transformatif sangat penting untuk membentuk peserta didik menjadi warga negara yang baik dalam konteks nasional dan global yang berguna untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan inklusif peserta didik yang kemudian disebut sebagai PKn kritis. Berkaitan dengan keterampilan berpikir kritis menekankan rasionalitas dalam merekonstruksi suatu ilmu adalah hal yang penting.

Pendidikan kewarganegaraan (PKn) berperan penting dalam menyiapkan warga negara muda untuk menghadapi perubahan zaman. Pembelajaran PKn perlu dikonstruksi secara humanis, dialogis, kritis, dan mengedepankan budi pekerti untuk membangun kemampuan berpikir kritis peserta didik dalam kehidupan masyarakat demokratis. Adapun tujuan Pendidikan Kewarganegaraan menurut Permendiknas No. 22 Tahun 2006 adalah agar peserta didik memiliki kemampuan sebagai berikut:

- a. Berfikir secara kritis, rasional dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan;
- b. Berpartisipasi secara aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta anti-korupsi;
- c. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya;
- d. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam peraturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Menurut pendapat di atas, tujuan utama pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk membentuk masyarakat yang memiliki budi pekerti dan selalu berpikir kritis dalam menanggapi isu kewarganegaraan serta selalu berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga akan menciptakan karakter masyarakat Indonesia yang baik dan aktif dalam kehidupan antar bangsa dan negara. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia, sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. tujuan PKn adalah mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.

Salah satu kompetensi abad 21 yang harus dimiliki peserta didik yaitu keterampilan belajar dan berinovasi yang meliputi kemampuan berpikir kritis dan mengatasi masalah, kemampuan berkomunikasi dan kolaborasi, dan kemampuan menciptakan kreativitas dan berinovasi (Triling dan Fadel, 2009: 49). Guna merealisasikan tujuan tersebut maka PKn memiliki tiga fungsi pokok yaitu mengembangkan kecerdasan warga negara (civic intelligence), membina warga negara agar memiliki sikap tanggung jawab (civic responsibility) dan mendorong warga negara untuk berperan serta dengan terlibat aktif dalam berbagai kegiatan (civic participation). Hal tersebut sejalan dengan Menurut Unwakoly (2022) yaitu: Pandangan ontologi terhadap berpikir kritis dalam sains difokuskan pada pengembangan kemampuan untuk menganalisis wacana secara kritis untuk

mengembangkan suatu tindakan. Dalam pandangan epistemologi, berpikir kritis menjadi alat untuk meningkatkan pemahaman atau menjadi alat untuk menentukan kebenaran atau ketidakbenaran berdasarkan pandangan para ilmuwan atau akademisi. Sedangkan dalam pandangan aksiologi terhadap berpikir kritis dapat dilihat dari kebermanfaatannya dalam sains

Merujuk pada pola Habermas yang mengkategorikan pengetahuan dalam tiga kategori yaitu teknis, praktis, dan emansipatoris maka untuk mewujudkan pembelajaran PKn kritis, Giroux (1980: 335-349) mengemukakan konsep rasionalitas dalam tiga kategori yaitu rasionalitas teknis, rasionalitas hermeneutik, dan rasionalitas emansipatori.

Rasionalitas teknis berhubungan dengan prinsip pengawasan dan kepastian yang menggunakan ilmu-ilmu alam sebagai model pengembangan teoritis. Rasionalitas teknis dalam kajian PKn berupa dua model yaitu sebagai berikut. Model kajian PKn sebagai transmisi kewarganegaraan dimana cenderung bersifat statis, konservatif, indoktrinatif dan konvensional. Pada pembelajaran PKn yang mengelaborasi isu kewarganegaraan dalam kehidupan masyarakat yang dinamis maka model transmisi kewarganegaraan menjadi kurang relevan karena akan membatasi kemampuan berpikir dan kreativitas peserta didik. Model kajian PKn sebagai ilmu sosial didasarkan pada asumsi bahwa peserta didik dapat berpikir kritis, mampu meneliti dan mengamati fenomena sosial sehingga dapat berpartisipasi dalam kehidupan Masyarakat

Rasionalitas hermeneutik tidak menunjukkan produksi pengetahuan yang monologis namun lebih memusatkan perhatian dalam memahami pola interaksi simbolis yang komunikatif. Implikasi rasionalitas hermeneutik dalam pembelajaran PKn adalah membantu pendidik memaknai realitas dibalik teks untuk mengungkap dimensi tersembunyi yang timbul dari muatan pengetahuan dan hubungan di dalam kelas. Pengetahuan tidak disampaikan secara indoktrinasi namun disampaikan secara dialogis yang bertujuan mendorong kemampuan peserta didik untuk mengeksplorasi dan mengartikulasikan pengalaman mereka sendiri. Dalam hal ini maka peserta didik akan belajar melalui kontak langsung dengan objek pembelajaran. Dalam konteks kajian PKn, pendekatan reflektif inkuiri dapat digunakan sebagai metode untuk memancing kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dengan metode tersebut, peserta didik dapat mengelaborasi, mengolah dan menganalisis permasalahan berdasarkan pengalamannya kemudian belajar bagaimana memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah. Dengan keterampilan tersebut, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang kritis dan mampu memberikan peran diri dalam kehidupan politik.

Rasionalitas emansipatori didasarkan pada prinsip, kritik dan tindakan yang bertujuan merefleksikan diri dengan aksi sosial yang telah dirancang. PKn dalam model rasionalitas emansipatori harus menghasilkan dan menekankan pentingnya hubungan sosial. Ziser berpandangan bahwa pendidikan harus mampu memadukan secara sinergis semua komponen mulai dari kurikulum, pembelajaran, proses belajar, penilaian, struktur organisasi, kebijakan, pengembangan profesi dan kenyataan di luar sekolah (Karim, 2009: 171). Oleh karena itu, menurut Mansour Faqih (Karim, 2009: 164) pendekatan yang digunakan bukan pendekatan pedagogi namun pendekatan andragogi yang menempatkan peserta didik sebagai orang dewasa dan memiliki kemampuan aktif merencanakan proses pendidikan sehingga peserta didik tidak lagi berperan sebagai objek pendidikan namun beralih peran sebagai subjek pendidikan. Dengan demikian, PKn kritis diharapkan dapat mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menjadi warga negara transformatif yang aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat, menjunjung tinggi persamaan dan keadilan dalam masyarakat demokratis.

Simpulan

Berdasarkan pemaparan di atas dapat direduksi konklusi dalam tulisan ini bahwa berpikir kritis berupaya menciptakan pendidikan yang kritis dan optimis dalam membangun masyarakat demokratis. Guna mewujudkan peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis guru harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan dan kompetensi agar guru tidak berperan sebagai transmitter ilmu namun sebagai fasilitator pengembangan ilmu. Proses pembelajaran PKn tidak lagi bersifat sentralistik, pasif dan indoktrinatif namun beralih pada pengembangan ilmu pengetahuan yang positif dan dinamis dimana guru harus berperan sebagai pendidik transformatif. Pada konteks kajian PKn, pendekatan reflektif inkuiri dapat digunakan sebagai metode untuk memancing kemampuan berpikir kritis peserta didik. Dengan metode tersebut, peserta didik dapat mengelaborasi, mengolah dan menganalisis permasalahan berdasarkan pengalamannya kemudian belajar bagaimana memecahkan masalah dan mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi masalah. Dengan keterampilan tersebut, peserta didik diharapkan dapat menjadi warga negara yang kritis dan mampu memberikan peran diri dalam kehidupan politik. Pembelajaran PKn perlu dikonstruksi melalui metode dialog komunikatif berdasarkan pengalaman, kemampuan berpikir kritis, kemampuan memecahkan masalah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik. Dengan demikian PKn kritis berupaya untuk menuju terwujudnya peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis untuk menjadi warga negara muda yang transformatif yang aktif terlibat dalam kehidupan masyarakat dan menjunjung tinggi persamaan serta keadilan dalam masyarakat demokratis.

Referensi

- Anggraeni, L. (2012). Penerapan Metode Studi Kasus Dalam Upaya Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Pada Mata Kuliah Hubungan Internasional. *Media Komunikasi FIS*, 11 (1). Hlm. 181-195.
- Banks, J. A. (2008). Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in A Global Age. *Educational Researcher*, 37 (3), 129-139.
- Budimansyah (2017). Teorisasi kewarganegaraan untuk perspektif Indonesia. Disajikan dalam kuliah pakar prodi FKIP UNS.
- Giroux, H A. (1980). *Critical Theory and Rationality in Citizenship Education*, Curriculum Inquiry. Amerika Serikat: Boston University.
- Hassoubah, Z. (2003). *Developing Creative & Critical Thinking Skill (Cara Berpikir Kreatif dan Kritis)*. Bandung: Yayasan Nuansa Cendekia.
- Hidayati. (2008). Pentingnya Pendidikan Nilai di Era Globalisasi. *Dinamika Pendidikan*, 2, Th. XV, 63-75
- Karim, M. (2009). *Pendidikan Kritis Transformatif*. Yogyakarta: Ar- Ruzz Media.
- Kerr, D. (1999). *Citizenship Education: An International Comparison*. International Review of Curriculum and Assessment Frameworks Paper 4. London: QCA. McLaren. (2002). *Contestin*
- Kusmidat (2011). Persepsi Guru PKn tentang Epistemologi Pancasila *Jurnal Citizenship*, Vol. 1 No. 1. 63-75.
- Sapriya & Fitriyari. (2012). *Indonesia dalam Hubungan Internasional*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan FPIPS UP
- Sapriya. (2013). *Pendidikan IPS*. Bandung: Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Press
- Somantri, N. (2001). *Menggagas Pembaharuan Pendidikan IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Trilling, Bernie and Fadel, Charles. (2009). *21st Century Skills: Learning for Life in Our Times*. San Francisco: John Wiley & Sons.
- Unwakoly, Samuel. (2022) Berpikir Kritis Pada Filsafat Ilmu: Tinjauan Pada Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi: *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol. 5 No. 2.
- Winataputra, U S. & Dasim B. (2012). *PKn Dalam Perspektif Internasional (Konteks, Teori dan Profil Pembelajaran)*. Bandung: Widya Aksara Press
- Winarno. (2013). *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan: Isi, Strategi, dan Penilaian*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Wuryan, S & Syaifullah. (2009). *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*. Bandung: Laboratorium PKn FPIPS

Universitas Pendidikan Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional